

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, nilai perusahaan, dan *good corporate governance* telah banyak dilakukan. Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut ini adalah uraian penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

2.1.1 Reni Dyah dan Denies (2012)

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh *good corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan yang mengambil populasi seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010 dan diukur dengan menggunakan instrument yang telah dikembangkan oleh *Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG) berupa *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tobin's Q*, *corporate governance* dengan menggunakan skor CGPI, *corporate social responsibility* yang dinyatakan dalam *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI), ukuran perusahaan, jenis industri, dan profitabilitas. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis deskriptif, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) GCG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan variabel kontrol *size*

dan *leverage*, 2) pengungkapan CSR tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dengan variabel kontrol *size*, jenis perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*, 3) GCG dan pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.

2.1.2 Katiya dan D.Agus (2011)

Penelitian ini menguji tentang pengaruh *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan sebanyak 22 perusahaan *go public* yang terdaftar di BEI tahun 2005-2009. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah CSR, nilai perusahaan, dan GCG. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji T dan uji regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kedua, *good corporate governance* sebagai variabel moderating secara signifikan berpengaruh terhadap hubungan antara CSR dan nilai perusahaan.

2.1.3 Ni Wayan (2010)

Penelitian ini melakukan pengujian tentang pengaruh *corporate governance* pada hubungan *corporate social responsibility* dan nilai perusahaan. Sampel yang diteliti adalah 40 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sampai tahun 2008. Variabel yang digunakan peneliti berupa *corporate social responsibility* yang dinyatakan dalam *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI), *Tobin's Q*, dan *corporate governance* yang diproksikan menggunakan

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan jumlah anggota komite audit. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah analisis faktor, statistik deskriptif, dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR dan GCG berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan GCG berpengaruh terhadap hubungan antara pengungkapan CSR dan nilai perusahaan.

2.1.4 Sylvia dan Sidharta (2008)

Penelitian ini meneliti tentang jenis manajemen laba dan pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan praktek *corporate governance* dengan studi kasus bukti-bukti dari Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan adalah seluruh jenis perusahaan yang terdaftar di BEJ antara tahun 1995-2002 sebanyak 144 perusahaan. Variabel yang digunakan adalah laba masa depan, manajemen laba, kepemilikan keluarga dan kelompok usaha, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan praktek *corporate governance* yang diukur dari ukuran auditor, dewan independen, dan keberadaan komite audit. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji koefisien determinasi dan statistik deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa tipe manajemen laba dipilih oleh perusahaan sampel cenderung ke arah manajemen laba efisien. Kepemilikan keluarga memiliki pengaruh signifikan pada jenis manajemen laba yang dipilih. Perusahaan dengan proporsi kepemilikan yang tinggi keluarga dan kelompok-kelompok non-bisnis lebih cenderung untuk memilih manajemen laba efisien daripada jenis lain dari perusahaan.

2.1.5 Marihot dan Doddy (2007)

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba di industri perbankan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEJ tahun 2000-2004. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, manajemen laba, dan *corporate governance* yang diproksikan dengan komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan keberadaan komite audit. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis deskriptif, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance*, yaitu komposisi dewan komisaris dan ukuran, serta adanya komite audit mempengaruhi manajemen laba bank umum perusahaan yang telah dideteksi dengan menggunakan model akrual tertentu dari Beaver dan Engel (1996).

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Pembeda	Reny Dyah dan Denies	Katiya dan D. Agus	Ni Wayan	Sylvia dan Sidharta	Marihot dan Doddy	Sekarang
1.	Tahun	2012	2011	2010	2008	2007	2013
2.	Sampel	Seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010 diukur dengan <i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI)	22 perusahaan <i>go public</i> yang terdaftar di BEI tahun 2005-2009	40 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sampai tahun 2008	Seluruh jenis perusahaan yang terdaftar di BEJ antara tahun 1995-2002 sebanyak 144 perusahaan	20 perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEJ tahun 2000-2004	Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2008-2011
3.	Variabel						
	Dependen	Nilai perusahaan yang diukur dengan <i>Tobin's Q</i>	Nilai perusahaan diukur dengan <i>price book value (PBV)</i>	Nilai perusahaan yang diukur dengan <i>Tobin's Q</i>		Manajemen laba diukur dengan model Beaver dan Engel (1996)	Nilai perusahaan yang diukur dengan <i>Tobin's Q</i>
	Independen	<i>Good Corporate Governance</i> (menggunakan CGPI), <i>Corporate Social Responsibility</i> (menggunakan CSRI)	<i>Corporate Social Responsibility</i> menggunakan CSRI	<i>Corporate Social Responsibility</i> menggunakan CSRI		Komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, dan ukuran perusahaan	<i>Corporate Social Responsibility</i> menggunakan CSRI
	Kontrol	Ukuran perusahaan, jenis industri,					

		profitabilitas					
	Moderasi		<i>Corporate Governance</i> menggunakan CGPI	Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan jumlah anggota komite audit			<i>Good Corporate Governance</i> menggunakan nilai komposit
4.	Teknik Analisis	Uji asumsi klasik, analisis deskriptif, dan Analisis regresi berganda	Uji parsial (Uji T) dan uji regresi berganda	Analisis faktor, statistik deskriptif, dan uji asumsi klasik	Uji koefisien determinas (uji R^2) dan statistik deskriptif	Uji asumsi klasik, analisis deskriptif, dan pengujian hipotesis	analisis deskriptif, uji normalitas, <i>moderated regression analysis</i> , dan pengujian hipotesis

Sumber : Ringkasan Penelitian Terdahulu

2.2 Landasan Teori

Pengungkapan informasi ditujukan agar tidak terjadi asimetri informasi antara pihak perusahaan dengan pihak eksternal. Keharusan pengungkapan informasi tidak hanya untuk kepentingan pihak internal perusahaan, tetapi agar dapat digunakan oleh pihak manajemen dan pihak eksternal perusahaan. Karena dasar inilah maka timbul kewajiban pengungkapan informasi non-keuangan yang selanjutnya disebut *corporate social responsibility*. Kewajiban pengungkapan ini dijelaskan lebih lanjut dalam *Signaling Theory*. Sedangkan untuk praktik *good corporate governance* dapat diuraikan dalam Teori Keagenan (*Agency Theory*).

2.2.1 Teori Pensinyalan (*Signaling Theory*)

Teori sinyal membahas mengenai dorongan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut disebabkan karena terjadinya asimetri informasi antara pihak manajemen dan pihak eksternal. Untuk mengurangi asimetri informasi maka perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dimiliki, baik informasi keuangan maupun non-keuangan. Salah satu informasi yang wajib untuk diungkapkan oleh perusahaan adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility*. Informasi ini dapat dimuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial perusahaan terpisah. Perusahaan melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* dengan harapan dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan (Ni Wayan, 2010).

Teori sinyal (Leland dan Pyle, 1977 dalam Scott, 2012:475) menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan yang memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor dimana perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pelaporannya dengan mengirimkan sinyal melalui laporan tahunannya. Salah satu informasi yang wajib untuk diungkapkan oleh perusahaan adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility*. Informasi ini dapat dimuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial perusahaan terpisah. Perusahaan melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* dengan harapan dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan.

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan diungkapkan dalam *annual report* yang mampu dijadikan sinyal oleh perusahaan ketika menarik minat investor untuk menanamkan dana pada saham perusahaan. Sinyal ini berupa informasi pengungkapan CSR dengan dorongan GCG yang dilakukan perusahaan. Perusahaan mengharapkan investor mempertimbangkan informasi tersebut. Jika investor mempertimbangkan informasi tersebut disertai kenaikan pembelian saham, maka akan terjadi kenaikan harga saham (Megawati, 2011).

2.2.2 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Brigham & Houston (2006:26) dalam Dyah dan Denies (2012), para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*). Hubungan keagenan (*agency relationship*) terjadi ketika satu atau lebih individu, yang disebut sebagai prinsipal menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada agen tersebut.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agen) dengan investor (pemilik). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan pemilik sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak.

Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan di mana masing-masing pihak berusaha mencapai tingkat kemakmuran yang dikehendaki. Teori agensi juga menjelaskan tentang asimetri informasi, di mana manajer memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dibanding dengan pemilik (pemegang saham), sehingga kecenderungan manajer untuk melakukan manipulasi melalui manajemen laba demi kepentingan pribadi akan semakin tinggi (Nahda dan D. Agus, 2011).

Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara pihak pemegang saham dan pihak manajer perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak dapat menimbulkan konflik keagenan. *Corporate governance* merupakan respon perusahaan terhadap konflik tersebut. Aspek-aspek *corporate governance* seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan jumlah anggota komite audit dipandang sebagai mekanisme kontrol yang tepat untuk mengurangi konflik keagenan (Ni Wayan, 2010).

2.2.3 ***Corporate Social Responsibility***

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan *corporate social responsibility* sebagai:

“Continuing commitment by business to behave ethically and contributed to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”.

Definisi tersebut menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang disertai dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan beserta keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas (Nor Hadi, 2011:47).

ISO 26000 berpendapat bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak dari kegiatan perusahaan pada masyarakat dan lingkungan, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis, yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan secara menyeluruh. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan penting dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan, dan bagi perusahaan yang telah *go public* nilai perusahaan akan tercermin pada harga pasar saham.

Crowther David (2008) dalam Nor Hadi (2011:59) menguraikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial menjadi tiga, yaitu:

1. *Sustainability*, berkaitan dalam melakukan aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan.
2. *Accountability*, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal.
3. *Transparency*, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Transparansi berperan untuk mengurangi asimetri

informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.

Menurut Nahda dan D. Agus (2011) perusahaan secara simultan akan menjalankan tiga jenis tanggung jawab yang berbeda kepada pemangku kepentingan secara seimbang. Penekanan kepada salah satu jenis tanggung jawab saja akan menyebabkan perusahaan berjalan secara tidak optimal. Ketiga jenis tanggung jawab tersebut mencakup:

1. *Economic responsibility*, perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan laba secara optimal. Dengan demikian para pengelola perusahaan memiliki tanggung jawab ekonomi diantaranya kepada para pemegang saham dalam bentuk pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba.
2. *Legal responsibility*, kendati perusahaan didirikan untuk menghasilkan laba, akan tetapi dalam melaksanakan operasinya perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan perundangan yang berlaku.
3. *Social responsibility*. Pelaksanaan tanggungjawab sosial merupakan suatu komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Salah satu alasan manajemen melakukan pelaporan sosial adalah untuk alasan strategis dalam rangka mendapatkan legitimasi sosial. Hal ini sangat erat kaitannya dengan isu lingkungan yang terjadi, seperti penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim (Nahda dan D. Agus, 2011).

Konsep *corporate social responsibility* melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumberdaya masyarakat, serta komunitas setempat (lokal). Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif dan statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara *stakeholders*. Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan dalam laporan yang disebut *sustainability reporting*. *Sustainability reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Sustainability reporting* harus menjadi dokumen strategis yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang *sustainability development* yang membawanya menuju kepada *core business* dan sektor industrinya (Rika dan Islahudin, 2008).

Komitmen dan kepedulian perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan CSR menurut Lako (2010:90) antara lain:

1. Sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam jangka panjang.
2. Memperkokoh profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan.
3. Meningkatnya akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas investor, kreditor, pemasok, dan konsumen.
4. Meningkatnya komitmen, etos kerja, efisiensi dan produktivitas karyawan.

5. Menurunnya kerentanan gejolak sosial dan resistensi dari komunitas sekitarnya karena diperhatikan dan dihargai perusahaan.
6. Meningkatnya reputasi, goodwill, dan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Darwin (2004) dalam Anggraini (2006) mengatakan bahwa *corporate social responsibility* terbagi menjadi 3 aspek besar, yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Sedangkan dalam penelitian ini mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan berdasarkan standar GRI (*Global Reporting Initiative*). *Global Reporting Initiative* (GRI) adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah memelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia (Rimba Kusumadilaga, 2010).

Penelitian ini menggunakan enam indikator pengungkapan yaitu: ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, hak asasi manusia, sosial dan produk. Dari enam indikator pengungkapan sosial berdasarkan standar GRI, terdapat tujuh puluh sembilan item. Indikator-indikator yang terdapat di dalam GRI yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Indikator Kinerja Ekonomi (*economic performance indicator*)
- 2) Indikator Kinerja Lingkungan (*environment performance indicator*)
- 3) Indikator Kinerja Tenaga Kerja (*labor practices performance indicator*)
- 4) Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (*human rights performance indicator*)
- 5) Indikator Kinerja Sosial (*social performance indicator*)

- 6) Indikator Kinerja Produk (*product responsibility performance indicator*)

2.2.4 ***Good Corporate Governance***

Konsep corporate governance timbul karena adanya keterbatasan dari *agency theory* dalam mengatasi masalah keagenan. Definisi GCG menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pemerintah, karyawan, kreditur, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka (Nahda dan D. Agus, 2011).

Menurut Ni Wayan (2010) tujuan *corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders*. *Corporate governance* yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Manfaat dari penerapan *corporate governance* dapat diketahui dari harga saham perusahaan yang bersedia dibayar oleh investor. Berdasarkan FCGI secara umum terdapat lima prinsip dasar GCG, yaitu:

- a. *Transparency* (transparansi), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang relevan mengenai perusahaan.
- b. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif.
- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian pengelolaan dengan prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

- d. *Independency* (kemandirian), yaitu pengelolaan dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan.
- e. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*.

Menurut Hidayah (2008) penerapan prinsip GCG dengan dukungan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk ketidakjujuran dalam *financial disclosure* yang merugikan para *stakeholder*, seperti ekspektasi yang jauh melampaui kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Dengan adanya konsep GCG manajemen memiliki pedoman yang lebih baik dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas perusahaan. Perusahaan yang telah menerapkan GCG akan lebih dipercaya kreditor dan investor sehingga sahamnya lebih likuid dan harga saham bisa semakin meningkat.

Untuk memastikan penerapan lima prinsip dasar GCG, bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang meliputi sebelas faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu:

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang ditunjuk oleh para anggota RUPS yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perusahaan. Dalam surat edaran Bank Indonesia dijelaskan bahwa dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal yang diatur dalam anggaran dasar bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, terdiri dari:

1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota dewan komisaris;
2. Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris; dan
3. Rekomendasi dewan komisaris.

B. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Dewan direksi adalah sebuah dewan yang ditunjuk oleh anggota RUPS untuk memimpin perusahaan, memilih serta menetapkan dan mengawasi tugas karyawan dan kepala bagian, menyetujui anggaran tahunan perusahaan, dan menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan. Dalam surat edaran Bank Indonesia dijelaskan bahwa dewan direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian serta dewan direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi dewan direksi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi, terdiri dari:

1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota dewan direksi;
2. Tugas dan tanggung jawab dewan direksi.

C. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Dalam surat edaran Bank Indonesia, dewan komisaris wajib membentuk paling kurang komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi, dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Keanggotaan komite audit terdiri dari 3 orang dan berasal dari pihak independen yang dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan hukum atau perbankan. Untuk anggota komite pemantau risiko terdiri dari 3 orang yang berasal dari pihak independen yang

memiliki keahlian di bidang keuangan dan manajemen risiko. Sedangkan untuk keanggotaan komite remunerasi dan nominasi terdiri dari 4 orang. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite, terdiri dari:

1. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota komite;
2. Tugas dan tanggung jawab komite;
3. Frekuensi rapat komite; dan
4. Program kerja komite dan realisasinya.

D. Penanganan benturan kepentingan

Surat edaran Bank Indonesia menjelaskan bahwa jika terjadi benturan kepentingan antara bank dengan pemilik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, pejabat eksekutif dan/ atau pihak lainnya yang terkait dengan bank maka anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank, bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern:

1. Pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai bank, antara lain tata cara pengambilan keputusan.
2. Administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.

E. Penerapan fungsi kepatuhan

Informasi yang perlu diungkap dalam penerapan fungsi adalah kepatuhan bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.

F. Penerapan fungsi audit intern

Auditor intern adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan internal auditing sebuah perusahaan. Audit intern ini dapat dilakukan jika auditor telah memahami sifat dan luasnya pelaksanaan kegiatan pada setiap jajaran perusahaan. Informasi yang perlu diungkap tentang fungsi audit intern adalah efektivitas dan cakupan audit intern dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan bank.

G. Penerapan fungsi audit ekstern

Audit ekstern adalah badan atau perorangan dari akuntan public independen yang terdaftar di Bank Indonesia yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Informasi yang perlu diungkap tentang fungsi audit ekstern adalah efektivitas pelaksanaan audit ekstern dan kepatuhan bank terhadap ketentuan mengenai:

1. Hubungan antara bank, akuntan publik dan bank indonesia bagi bank konvensional, atau
2. Hubungan antara bank syariah, kantor akuntan publik, akuntan publik, dewan pengawas syariah dan bank indonesia bagi bank syariah.

H. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern

Informasi yang perlu diungkap dalam penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern meliputi:

1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

I. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*)

Informasi yang perlu diungkap terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait adalah jumlah total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/*group* inti per posisi laporan.

J. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

K. Rencana strategis Bank

Rencana strategis bank meliputi rencana jangka panjang (*corporate plan*), dan rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*).

2.2.5 Nilai Perusahaan

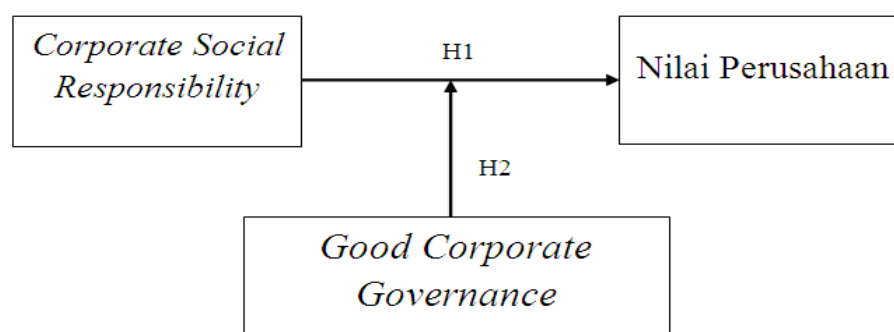
Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga

saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. Para profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris (Rika dan Islahudin, 2008).

Harga saham penting untuk diperhatikan karena tidak pernah tetap, kadang naik, kadang turun. Jika harga saham di pasar modal naik, maka perusahaan akan mencapai nilai maksimal dan kemakmuran pemegang saham juga meningkat sehingga tujuan perusahaan tercapai, dan begitu juga sebaliknya (Nahda dan D. Agus, 2011).

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian pustaka dan uraian teori diatas, maka dapat disusun suatu model atau kerangka penelitian untuk menggambarkan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan dengan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi, yaitu:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3.1 Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan

Pelaporan CSR dimaksudkan untuk mengurangi asimetri informasi serta memberi pengetahuan terhadap para investor tentang apa saja yang sudah perusahaan lakukan untuk lingkungan dan masyarakat. CSR dibentuk untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat mengingat masyarakatlah yang memberikan peran besar untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap masyarakat. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan bersama antara perusahaan, pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, serta komunitas setempat. Pengaturan CSR juga bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya (Ni Wayan, 2010).

Perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan informasi tanggung jawab sosial sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan dan sosial yang baik akan direspon positif oleh investor melalui peningkatan harga saham. Apabila perusahaan memiliki kinerja lingkungan dan sosial yang buruk maka akan muncul keraguan dari investor sehingga direspon negatif melalui penurunan harga saham (Almilia dan Wijayanto, 2007). Hasil penelitian Nahda dan D. Agus (2011) menemukan

bahwa CSR secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ini berarti semakin baik penerapan CSR perusahaan maka nilai perusahaan juga akan semakin baik.

2.3.2 *Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, dan Nilai Perusahaan*

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia menyatakan bahwa salah satu tujuan pelaksanaan *corporate governance* adalah mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Implementasi CSR merupakan salah satu wujud pelaksanaan prinsip *corporate governance*. Perusahaan yang telah melaksanakan *corporate governance* dengan baik sudah seharusnya melaksanakan aktivitas CSR sebagai wujud kepedulian perusahaan pada lingkungan sosial. Penganut paham *corporate governance* lebih mudah menerima adanya kebutuhan dan kewajiban untuk melaksanakan CSR karena kedua kegiatan tersebut berlandaskan pemahaman falsafah yang sama (Ni Wayan, 2010).

Responsibility yang penekanannya diberikan kepada kepentingan *stakeholders* perusahaan, termasuk di dalamnya adalah karyawan, pelanggan, konsumen, masyarakat, serta pemerintah selaku regulator. Dari penjelasan tersebut prinsip *responsibility* melahirkan gagasan *corporate social responsibility* (CSR) atau peran serta perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya. Dalam gagasan CSR perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab terhadap nilai perusahaan (*corporate value*) yang hanya direfleksikan ke dalam kondisi

keuangan, namun harus juga berpijak pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana anggapan masyarakat sekitar muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan lingkungan hidup (Nahda dan D. Agus, 2011).

Dengan adanya penerapan CSR, maka akan mencerminkan kinerja manajemen perusahaan. Semakin baik pengelolaan perusahaan, maka semakin baik pula pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan yang akan berdampak pada tingginya nilai perusahaan.

Dengan demikian mekanisme GCG akan bermanfaat dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholders* (Nahda dan D. Agus, 2011).

Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak. Kesadaran mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial dapat berdampak jangka panjang terhadap kinerja perusahaan dan akan mengarahkan kepentingan *board of directors* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. *Corporate governance* tidak akan efektif tanpa dorongan pengungkapan tanggung jawab sosial berkelanjutan,

karena perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhan berbagai *stakeholders* dan juga mampu menghasilkan laba untuk dapat menciptakan nilai bagi pemilik atau pemegang saham (Jamail *et al.*, 2008 dalam Oktavia, 2013).

Corporate governance menyangkut tanggung jawab perusahaan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan terutama atas kegiatan ekonomi dan segala dampaknya, sedangkan CSR adalah kegiatan yang diselenggarakan perusahaan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat di luar kegiatan utama perusahaan. Kedua kegiatan tersebut sama-sama bertujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham namun tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya (Zarkasyi, 2008 dalam Ni Wayan, 2010). Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan sejumlah kebijakan untuk menuntun pelaksanaan CSR. Semua hal tersebut tidak terlaksana dengan baik apabila perusahaan tidak menerapkan *good corporate governance* beserta aspek-aspek yang termasuk di dalamnya.

CSR tidak akan dapat berjalan maksimal apabila penerapan GCG belum berjalan dengan baik didalam perusahaan. Dengan adanya penerapan GCG, diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan akan perlunya sadar lingkungan dan masyarakat sekitar untuk meningkatkan nilai perusahaan agar investor lebih tertarik kepada perusahaan tersebut. Hasil penelitian Ni wayan (2010) menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* yang baik mendorong perusahaan melaksanakan aktivitas CSR sehingga dapat meningkatkan reputasi perusahaan.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proporsi yang selanjutnya akan dapat diuji secara empiris (Indriantoro dan Supomo, 2002:73). Berdasarkan uraian terkait landasan teori diatas, maka dapat dibuat hipotesis penelitian antara lain sebagai berikut:

H1 : *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan

H2: *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi